

Denny Agiel Prasetyo: Sumpah Pemuda Persatuan Dalam Perbedaan



Kupang,Wartapedia.com – Sumpah Pemuda adalah peristiwa penting bagi bangsa Indonesia yang menjadi tonggak awal persatuan seluruh ras, suku dan agama yang ada di Indonesia. Sebuah pergerakan pemuda di Indonesia yang menyadarkan arti dari konsep persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, yang pada akhir tujuannya membangkitkan usaha dan upaya segenap elemen masyarakat demi tercapainya kemerdekaan bangsa Indonesia.

Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Gerakan Kebangsaan Indonesia (GERBANG INDONESIA), Denny Agiel Prasetyo saat dihubungi media ini, Rabu (20/10/2020).

Denny mengatakan, Sebagai pemuda saat ini, perlu memaknai lebih dalam arti dari butir-butir sumpah pemuda yang diikrarkan para pendahulu kita, yang tertulis pada prasasti di salah satu dinding Museum Sumpah Pemuda yang berlokasi di Jakarta, adalah sebagai berikut:

- 1.Kami poetra dan poetri Indonesia mengakoe bertoempah darah jang satoe, tanah Indonesia.
- 2.Kami poetra dan poetri Indonesia mengakoe berbangsa jang

satu, bangsa Indonesia

3. Kami poeta dan poetri Indonesia mendjoendjoeng bahasa persatoean, bahasa Indonesia

“Butir pertama dapat dimaknai bahwa sejauh apapun kita melangkah dan pergi meninggalkan tanah air akan tetapi perasaan rindu dan semangat tetap akan kembali ke tanah air, yaitu Indonesia. Sementara pada butir kedua dapat memiliki arti bahwa bagaimanapun perbedaan yang ada di Indonesia akan tetapi kita tetap satu bangsa, bangsa Indonesia. Butir ketiga memiliki arti bahwa bahasa Indonesia adalah identitas kita, suatu keharusan terhadap sikap yang nyata dalam mengedepankan bahasa Indonesia,” Urai Denny.

Dirinya menambahkan, Pada masa itu, semua pemuda dan pemudi tidak lagi memandang perbedaan suku, ras dan asal daerah sebagai penghalang dalam mewujudkan cita-cita.

“Berkaca dari sejarah tersebut, cita-cita para pendahulu kita harus diteruskan oleh para pemuda saat ini. Persatuan dan kesatuan elemen masyarakat khususnya para pemuda dengan tidak memandang perbedaan, akan mewujudkan kemerdekaan Indonesia pada waktu itu. Saat ini, persatuan dan kesatuan tersebut perlu diikrarkan kembali, untuk bersama-sama saling bahu membahu menuju pembangunan Indonesia yang mensejahterakan masyarakat,” Pungkas Aktifis 98 ini. (ML)

Pastikan Aman Covid-19,

Makorem 161/Wira gelar Rapid Test.



Kupang, Wartapedia.com – Seperti kita ketahui bersama bahwa berbagai cara dan upaya telah diambil oleh Satgas Covid-19 dan seluruh komponen masyarakat, termasuk didalamnya Korem 161/Wira Sakti beserta komponen bangsa lainnya dalam upaya pendisiplinan masyarakat tentang protokol kesehatan dan pencegahan penyebaran Covid-19, baik itu di lingkungan masyarakat maupun di lingkungan Makorem 161/Wira Sakti sendiri.

Hal tersebut disampaikan Kasrem 161/Wira Sakti Kol Inf Jemz A. Ratu Edo, disela sela pelaksanaan kegiatan Rapid Test, Selasa (27/10/2020) di Ruang Sonbai 2 Makorem 161/Wira Sakti.



Lebih lanjut dikatakan tujuan dari pelaksanaan Rapid test ini

sebagai upaya melawan Covid-19 di lingkungan Makorem 161/Wira Sakti.

“Kegiatan Rapid Test ini dilaksanakan sebagai upaya terus menerus dan tanpa henti untuk memastikan seluruh anggota Makorem 161/Wira Sakti aman Covid-19, selain itu juga wahana untuk mengingatkan pentingnya protokol kesehatan,” jelasnya.

Rapid test yang diselenggarakan Denkesyah 09.04.01 Kupang ini diikuti oleh 130 personel anggota Makorem 161/Wira Sakti.(penrem161ws)

Kodim 1612 Manggarai Gelar Komsos Dengan Komponen Bangsa



[Ruteng,Wartapedia.com](https://www.wartapedia.com) – Kodim 1612 Manggarai menggelar kegiatan Komsos dengan komponen bangsa lainnya, bertempat di aula Makodim, Selasa (27/10/2020).

Kegiatan mengambil tema” Menjaga keutuhan dan Kemajuan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Kadim 1612 Manggarai Mayor Chb I Wayan Subrata yang mewakili Dandim 1612 Manggarai dalam sambutannya menyampaikan, bahwa sinergisitas antara semua komponen bangsa sangat diperlukan.

“Banyak hal yang perlu kita jalani bersama dan perhatikan bersama dalam membangun bangsa ini dan daerah kita Manggarai ini, TNI hadir dalam hal itu, dan tentunya harus bersama dengan pemerintah, Polri dan Masyarakat itu sendiri,” Ujarnya.

Dikatakan untuk wilayah Kodim 1612 Manggarai sudah banyak kegiatan bersama yang dilakukan, seperti kegiatan bersama dengan dinas pertanian, kegiatan bersama dengan Pol PP, kegiatan pencegahan Covid-19 bersama tim gugus tugas Kabupaten, Kegiatan pencegahan Kamtibmas dengan Kesbangpol serta banyak lagi kegiatan lainnya.

“Ini wujud kerjasama kita dalam memajukan Daerah ini serta menjaga stabilitas keamanannya. Dalam menjalankan semua itu, tentunya harus dilakukan dengan terjalinnya komunikasi dan koordinasi yang baik pula,” tutur Kasdim Wayan.



Perwakilan Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Asiten II , Laurensius Santu dalam sambutannya menyampaikan, bahwa pihak pemerintah sudah merasakan dampak positif dari kerjasama yang dibangun bersama dengan pihak Kodim 1612 Manggarai.

“Ini telah berlangsung lama, dan selalu berjalan baik, tentunya kita harus pertahankan kedepannya. Masih banyak yang harus kita benahi bersama dan harus kita jalankan bersama, tentu melalui komunikasi yang baik,” Ungkapnya.

Dirinya menambahkan, Semua komponen dilingkup pemerintahan Kabupaten Manggarai selalu siap untuk terus membangun kebersamaan yang sudah terjalin, tentunya dengan selalu

memberi masukan serta mencari solusi apabila ada yang harus kita selesaikan.

“Kami Pemda Manggarai mengapresiasi kerjasama yang telah kita bangun selama ini, dan semoga dikemudian hari akan lebih baik lagi,” tutup Lourensius.

Hadir dalam kegiatan ini, Kasad Pol PP, DP2KBP3A, Kesbangpol, Dinas Infokom, purnawirawan TNI, Tokoh Masyarakat dan insan Pers. Kegiatan dilanjutkan dengan acara dialog serta diakiri dengan acara ramah tama bersama. (Red)

Petrus Selestinus: Pemberian Hak Atas Tanah Oleh Walikota Merupakan Tindakan Administrasi Negara



Kupang, Wartapedia.com – Mantan Komisioner Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN), Petrus Salestinus mengatakan Kejaksaan Tinggi NTT saat ini sedang giat

mengungkap kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan pemberian Hak Atas Tanah kepada 40 warga Kota Kupang pada tahun 2016, ketika itu dijabat oleh Johannes Salean. Padahal tindakan Johannes Salean Cs merupakan tindakan dalam ruang lingkup hukum Administrasi Pemerintahan dalam fungsi representasi negara kepada warga Kota Kupang yang telah memenuhi syarat formil-materiil Hukum Administrasi Negara.

Lebih lanjut Petrus menjelaskan, karena itu menjadi janggal bahkan prematur jika saja Kejaksaan Tinggi NTT mendahului proses pidananya, tanpa terlebih dahulu memberikan kepastian hukum melalui mekanisme Administrasi Negara berupa pencabutan hak oleh Kantor Pertanahan Kota Kupang dan/atau Walikota Kupang atau berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara atau Putusan Pengadilan Perdata melalui gugatan perdata ke Pengadilan Negeri.

“Jika Kejaksaan tetap mengejar proses pidana, kemudian status pemilikan tanah yang hak-haknya sudah melekat pada 40 orang penerima hak secara hukum tidak dicabut atau dibatalkan terlebih dahulu, maka apapun alasannya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, tidak berwenang menilai dan memutuskan untuk membatalkan SK. Pemberian Hak Atas Tanah dimaksud kepada 40 warga Kota Kupang penerima Hak yang sudah mengikat,” Ujar Petrus saat dihubungi media Wartapedia.com Selasa (27/10/2020).

Dengan demikian terdapat inkonsistensi sikap dimana di satu pihak ada upaya keras Kejaksaan secara pidana untuk mengejar pembuktian bahwa telah ada perbuatan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran hukum yang merugikan negara, tetapi pada waktu yang bersamaan Kejksaan Tinggi NTT, membiarkan status Hak Atas Tanah yang diproteksi dengan SK Pemberian Hak dan Sertifikat Hak tetap melekat bahkan mengikat, karena tidak dibatalkan Pengadilan yang berwenang.

Johanes Salean Cs Representasi Fungsi Mengatur Dari Negara

Lebih lanjut, Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) ini mengatakan sebagai organ Pemerintah dalam Muspida (sekarang Forkopimda) NTT, Kejaksaan Tinggi NTT selaku Pengacara Negara seharusnya tahu (tetapi pura-pura tidak tahu), ketika proses Pemberian Hak Atas Tanah dimaksud terjadi pada tahun 2016, dimana Johannes Salean Cs sesungguhnya tengah melaksanakan fungsi mengatur dll. dari Negara. Namun Kejaksaan Tinggi NTT tidak mengambil langkah-langkah hukum apapun untuk mencegah atau membatalkan proses pemberian Hak dimaksud, jika terjadi pelanggaran prosedur.

“Karena itu menjadi aneh bin ajaib tindakan Kejaksaan Tinggi NTT, karena setelah 4 tahun kemudian baru ujung-ujung getol menuduh mantan pejabat Walikota Kupang dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang menyalahgunakan wewenang atau melanggar hukum, ketika kebijakan pemberian Hak Atas Tanah kepada 40 orang warga Kota Kupang dimaksud bersifat final, kemudian diproses pidana dengan dalih tindak pidana korupsi,” Ungkap Pertus yang juga adalah Advokat Peradi.

Ditambahkan, didalam proses pemberian Hak Atas Tanah terdapat Hak Pemerintah untuk mencabut kembali Hak Atas Tanah yang sudah diberikan, sebagai implementasi dari Peraturan Menteri Negara Agraria atau Kepala BPN. Dengan demikian posisi Johannes Saelan Cs jelas, selaku pemegang Hak Menguasai dari Negara, yang diberi wewenang berdasarkan pendelegasian dari Menteri Agraria kepada Daerah untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, mengatur hubungan hukum antara warga masyarakat dengan pemerintah dalam pemberian Hak Atas Tanah.

Uji Keabsahan Penggunaan Wewenang Walikota

Petrus menegaskan, Disinilah proses Administrasi Pemerintahan berlangsung, dimana Walikota Kupang dan Kantor Pertanahan Kota Kupang adalah organ negara yang mengambil kebijakan memberikan Hak Atas Tanah hingga lahirnya Keputusan Pejabat TUN yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi 40 orang warga pemegang hak, berupa SK. Pemberian

Hak Atas Tanah dalam bentuk Sertifikat Hak Atas Tanah sebagai bukti Hak yang hingga saat ini berlaku dan mengikat termasuk mengikat Kejaksaan Tinggi NTT.

“Untuk menilai apakah tindakan Walikota Kupang dan Kepala Kantor Pertanahan ketika mengeluarkan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah dimaksud, sebagai Keputusan TUN dan bersifat Perdata atau bukan, apakah merupakan keputusan yang bertentangan dengan Hukum dan AUPB atau tidak, dan apakah kebijakan pemberian Hak dimaksud terjadi tindakan yang melampaui wewenang atau mencampuradukan wewenang atau bertindak sewenang-wenang, inilah yang harus diuji terlebih dahulu, melalui Peradilan TUN atau Peradilan Perdata, bukan Kejaksaan dan bukan Pengadilan Tipikor,” Kata Petrus.

Sementara itu, Jika upaya Administrasi dan upaya Hukum melalui Gugatan ke PTUN atau Peradilan Umum Cq. Pengadilan Negeri secara Perdata diabaikan oleh Pemkot Kupang atau Kejaksaan Tinggi NTT selaku Pengacara Negara, dan Pemerintah lebih memilih penyelesaian melalui proses pidana korupsi, maka Pemerintah dan Kejaksaan Tinggi NTT, dilihat dari sudut Hukum Administrasi Pemerintahan, dapat dinilai sedang melanggar larangan menyalahgunakan wewenang, yang meliputi larangan (melampaui wewenang atau mencampuradukan wewenang atau bertindak sewenang-wenang) sekalipun atas nama penegakan hukum.

“Oleh karena itu, Kejaksaan Tinggi NTT sebaiknya tangguhkan seluruh proses pidana yang sedang berjalan dan tangguhkan penahanan atas diri Johannes Salean Cs, karena ada dasar hukum dan alasan hukum yang dapat dipertanggung-jawabkan. Tempuhlah upaya Administrasi melalui Pembatalan SK. Pemberian Hak, Gugatan TUN atau Gugatan Perdata terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat dalam Pemberian Hak Atas Tanah yang diklaim sebagai milik Pemda, untuk memastikan terlebih dahulu, sah tidaknya kebijakan Pemberian Hak Atas Tanah dimaksud. Ini negara hukum Bung Jaksa,” Pungkas Petrus Selestinus Koordinator TPDI dan Advokat Peradi. (ML)

Babinsa Koramil 1604-06/Batakte Tak Segan Terjun Langsung Guna Bantu Warga Binaan Panen Tomat



Oelamasi,Wartapedia.com – Babinsa Koramil 1604-06/Batakte Kodim 1604/Kupang Serda Hendrik membantu petani merawat sekaligus memanen tanaman tomat yang tumbuh subur di perkebunan milik Bapak Diky Netu bertempat di Dusun 1 RT 001 RW 001 Desa Oematnunu Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang, Senin (26-10-2020).

“Kegiatan pendampingan seperti ini dilakukan oleh Babinsa sebagai upaya untuk memberikan motivasi kepada para petani agar selalu bersemangat walaupun masih dalam kondisi seperti ini,” kata Babinsa Serda Hendrik.

Selain itu, Serda Hendrik juga memberikan informasi tentang membersihkan tanaman tomat dari rumput pengganggu, pemberian pupuk organik dan penyiraman secara rutin pada pagi dan sore

hari, bagaimana cara melakukan perawatan tomat supaya tanaman tomat dapat tumbuh subur agar membuahkan hasil yang besar dan banyak,” tutur Babinsa.

Jika tanaman terserang hama, maka cabutlah tanaman yang terserang dan buang jauh dari tanaman tomat yang lain. Sedangkan pemberian pestisida bisa dilakukan jika serangan hama sudah parah dan pilihlah pestisida yang organik.

Ditempat terpisah, Danramil 1604-06/Batakte Kapten Cba Paulus Pati menyampaikan kepada Babinsa agar selalu mendukung dan mendampingi para petani yang berada di wilayah. Kegiatan tersebut merupakan kepedulian Babinsa terhadap warga yang berada di wilayah binaan.



“Kegiatan seperti ini sangat positif dan pastinya sangat membantu warga masyarakat untuk menambah hasil perekonomian,” ujarnya.

Harapannya sinergitas antara TNI dan masyarakat ini terus ditingkatkan guna memupuk rasa kebersamaan, gotong-royong demi mewujudkan kemanunggalan TNI dengan Rakyat dalam rangka mewujudkan Ruang, Alat & Kondisi juang yang tangguh di wilayah Kodim 1604/Kupang,” pungkas Danramil.

Bapak Diky Netu, salah satu petani di Desa Oematnunu mengucapkan terima kasih atas keterlibatan langsung Babinsa dalam membantu merawat dan memanen tanaman tomat.

Bapak Diky selaku pemilik lahan tersebut mengatakan, dirinya senang dengan kehadiran bapak Babinsa yang tidak segan-segan terjun langsung untuk membantu.

“Kami tentunya sangat senang dan selalu mendoakan TNI selalu sehat serta sukses dalam menjalankan tugasnya setiap hari,” harapnya.

“Keberadaan Babinsa dapat memotivasi para petani sehingga lebih giat dalam mengolah lahan pertaniannya dan selalu menampung keluhan kesah para petani untuk dicarikan solusinya,” Ujar Bapak Diky. (Pendim1604/Kupang)

Presiden RI: Pastikan Keamanan dan Keefektifan Vaksin COVID-19



Jakarta, Wartapedia.com – Presiden Jokowi memberikan pengantar pada Rapat Terbatas mengenai Rencana Pengadaan dan Pelaksanaan Vaksinasi, Senin (26/10) siang, di Istana Merdeka, Jakarta.

Pemerintah terus melakukan langkah gerak cepat dalam menangani

pandemi COVID-19, termasuk dalam pengadaan dan pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Namun, diingatkan oleh Presiden Joko Widodo, langkah gerak cepat tersebut harus dilakukan dengan dengan penuh perencanaan dan persiapan yang matang.

Presiden menginstruksikan agar dalam pengadaan dan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 harus dipastikan sisi keamanan dan keefektifannya.



“Keamanan itu artinya kalau disuntik itu betul-betul memang sudah melalui sebuah tahapan-tahapan uji klinis. Karena kalau tidak, ada satu saja yang bermasalah nanti bisa akan menjadikan ketidakpercayaan masyarakat terhadap upaya vaksinasi ini,” ujar Presiden dalam Rapat Terbatas mengenai Rencana Pengadaan dan Pelaksanaan Vaksinasi, Senin (26/10) siang, di Istana Merdeka, Jakarta.

Semua tahapan, imbuhnya, harus mengikuti kaidah-kaidah ilmu pengetahuan, data sains, dan juga standar-standar kesehatan.

Presiden juga mengingatkan bahwa aspek keamanan dan efektivitas vaksin tersebut menjadi perhatian utama masyarakat, termasuk pada pakar dan para peneliti.

“Hati-hati, jangan sampai kita tergesa-gesa ingin vaksinasi sehingga kaidah-kaidah saintifik dan data-data sains (serta) standar kesehatan ini dinomorduakan. Tidak bisa. Jangan timbul persepsi bahwa pemerintah itu tergesa-gesa, terburu-buru tanpa mengikuti koridor ilmiah yang ada,” tegas Presiden.

Diakui Presiden, saat ini semua negara pasti menginginkan adanya kecepatan untuk menuntaskan penanganan pandemi,

termasuk dalam memberikan pengadaan dan pelaksanaan vaksinasi kepada warganya. Namun, diingatkannya. hal-hal tersebut juga tidak boleh dilakukan tergesa dengan tanpa perencanaan matang.

“Memang kita ingin langkah gerak cepat tetapi penuh dengan perencanaan yang matang dan persiapan yang matang,” pungkas Presiden. (DW/JR)

Wagub Harap Kerja Sama Dagang Turunkan Angka Kemiskinan



[Kupang, Wartapedia.com](https://www.wartapedia.com) – Wakil Gubernur (Wagub) NTT, Josef A. Nae Soi mengharapkan agar kegiatan misi dagang antara Provinsi Jawa Timur dengan Nusa Tenggara Timur dapat menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kedua provinsi.

“Prosentase kemiskinan di NTT masih sangat tinggi. Jawa Timur pastinya secara prosentase, tingkat kemiskinan masih rendah. Kerjasama (dagang) ini diharapkan dapat turunkan angka kemiskinan dan tingkatkan derajat hidup masyarakat kita agar jadi lebih baik,” kata Wagub JNS saat memberikan sambutan pada

acara Temu Bisnis Misi Dagang Jawa Timur dan Nusa Tenggara Timur di Hotel Aston, Senin (26/10).

Dikatakan Wagub JNS, dua Provinsi yang sama-sama punya nama akhir Timur ini mempunyai potensi besar baik itu flora, fauna maupun pelikan atau mineral tambangnya. Butuh interaksi dan interrelasi yang intensif agar terjalin hubungan yang saling menguntungkan. Atau yang lebih dikenal sebagai hubungan simbiosis mutualisme.

“Sebagai contoh, kami di NTT punya kelor dengan kualitas terbaik kedua di dunia setelah Spanyol. Pohon ini disebut miracle tree atau pohon ajaib karena punya kasiat banyak termasuk meningkatkan imunitas tubuh. Varian produk kelor yang diolah oleh para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah di NTT seperti teh, kue, mie dan lainnya dapat dipasarkan di Jawa Timur,” jelas Wagub NTT.

Lebih lanjut Wagub Nae Soi mengapresiasi upaya misi dagang yang dirintis kedua provinsi sebagai upaya untuk saling mengisi dan saling membantu dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya perjanjian kerjasama, kegiatan tersebut diharapkan akan semakin meningkat di tahun-tahun berikutnya.



“Saya bersama Gubernur punya visi NTT Bangkit, NTT Sejahtera. Visi masyarakat sejahtera ini juga diusung oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur. Dengan adanya kesamaan visi ini, kita berharap kerjasama seperti ini semakin diperkokoh dan diperluas ke depannya,” pungkas Wagub Josef Nae Soi.

Sementara itu, Wagub Jawa Timur, Emil E. Dardak dalam sambutannya mengatakan kegiatan misi dagang dilaksanakan karena adanya keinginan bersama untuk wujudkan kesejahteraan. Dengan semangat kolaborasi, kita ingin realisasikan kesejahteraan secara bersama-sama antara masyarakat NTT dan Jawa Timur.

“NTT punya potensi yang luar biasa, begitu pula Jawa Timur. Namun potensi ini tidak maksimal kalau tidak saling berdagang. Setiap masyarakat akan mengalami keuntungan kalau terjadi perdagangan. Karena perdagangan memungkinkan kita untuk fokus pada keunggulan kita. Dengan misi dagang ini, kita bisa menampilkan keunggulan kita masing-masing,” jelas Emil Dardak.

Dikatakan mantan Bupati Trenggalek, secara geografis luas daratan Jawa Timur dan NTT itu sama. Kalau NTT sedang memaksimalkan potensi-potensinya seperti seperti garam, kelor dan potensi lainnya, Jawa Timur sedang berusaha meningkatkan industri. Industri ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat NTT. Jawa Timur juga dapat fasilitasi perdagangan komoditas dari NTT ke pulau lainnya di Jawa dan Sumatera.

“Pengembangan industri adalah pilihan yang tepat bagi Jawa Timur yang punya penduduk sekitar 40 juta jiwa. Sektor ini menyumbang sekitar 30 persen, perdagangan 18 sampai 20 persen dan pertanian sekitar 10 sampai 11 persen untuk pertumbuhan ekonomi Jawa Timur. Kami berharap pola kerjasama ini ke depannya tidak hanya misi dagang tapi juga kerjasama investasi. Bukan tidak mungkin ke depan, kami bisa berinvestasi dan membangun supply chain atau rantai pasok sehingga industrialisasi terjadi di NTT dan sekaligus meningkatkan perdagangan di Jawa Timur. Inilah yang dinamakan sinergi dan kolaborasi,” jelas Emil Dardak.

Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Timur, Drajat Irawan selaku Ketua Panitia dalam laporannya mengungkapkan kegiatan misi dagang di Kupang merupakan

kegiatan bersifat offline ketiga setelah di Semarang dan Riau selama tahun 2020. Juga dilaksanakan kegiatan secara online di beberapa Provinsi.

“Kegiatan ini mempertemukan para pelaku usaha dari Jawa Timur dan Nusa Tenggara Timur. Karena banyak komoditi yang dikirimkan dari Jawa Timur dan sebaliknya dari NTT ke Jawa Timur. Kegiatan ini dihadiri oleh 44 pelaku usaha dari Jawa Timur. Hanya 20 pelaku usaha yang difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur, selebihnya datang secara mandiri karena mereka merasa penting untuk ketemu dengan pelaku usaha dari NTT. Sementara pelaku usaha dari NTT yang hadir dalam acara ini sekitar 100 lebih orang sehingga total pelaku usaha yang dipertemuan sekitar 150-an,” jelas Drajat Irawan.

Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi NTT dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur oleh Wagub NTT dan Wagub Jawa Timur. Juga Kadis Perindustrian dan Perdagangan, Kadis Koperasi dan Usaha Kecil Menengah serta Kadis Penanaman Modal dan Perizinan Satu Pintu dari kedua provinsi. Juga dilakukan tukar cinderamata antara Wagub NTT dan Wagub Jawa Timur.

Tampak hadir pada kesempatan tersebut Anggota DPD RI sekaligus Ketua Kadin NTT, Abraham Paul Liyanto, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT, I Nyoman Ariawan Atmaja, pimpinan perangkat daerah dari kedua Provinsi, para pelaku usaha dan perdagangan, insan pers dan undangan lainnya. (Humas dan Protokol Setda Provinsi NTT).

Gelar Karya Bakti TNI,

Anggota Kodim 1604/Kupang Serbu Masjid Al-Alak dan Gereja GMT Ora Et Labora



[Kupang, Wartapedia.com](https://wartapedia.com) – Kodim 1604/Kupang melaksanakan kegiatan Karya Bakti TNI Satkowil Semester II TA 2020, Minggu (25-10-2020).

Komandan 1604-07/Alak Kapten Inf Soleman Abdul Syukur mengatakan Karya Bakti TNI ini merupakan program Karya Kakti TNI Satkowil Semester II TA 2020.

Karya Bakti TNI dibagi menjadi 2 sasaran. Pertama pembangunan Masjid Al-Alak di Kelurahan Pankase Oeleta, Kecamatan Alak Kota Kupang dan sasaran kedua adalah pembangunan Gereja GMT Ora Et Labora Air Lobang bertempat di Jalan Air Lobang 2 RT. 044 RW. 018 Kelurahan Sikumana Kecamatan Maulafa Kota Kupang.

“Terimakasih untuk warga masyarakat yang cukup antusias membaur bergotong-royong hingga terjalin silaturahmi, sehingga kata TNI kuat bersama rakyat bukan hanya slogan tapi kita laksanakan,” ujar Danramil.

Disela-sela kegiatan, Danramil menjelaskan bahwa kegiatan Karya Bakti TNI merupakan wujud kebersamaan dan sinergitas

antara TNI dengan rakyat melalui gotong royong yang sudah menjadi ciri khas dan budaya budaya luhur Bangsa Indonesia yang harus selalu dijaga dan dilestarikan.



“Tentunya melalui Karya Bakti ini akan mengembalikan ciri khas masyarakat Indonesia yaitu gotong royong, saling membantu dan kerja sama demi kepentingan umum sehingga terjalin silaturahmi antara TNI dengan Rakyat,” ungkapnya.

Danramil berharap melalui kegiatan Karya Bakti ini dapat meningkatkan rasa kebersamaan yang merupakan nilai leluhur Bangsa Indonesia sekaligus dapat membantu kemajuan di desa. Guna menciptakan Ruang, Alat dan Kondisi Juang yang Tangguh.

Ketua Yayasan Insan Madani Al-Alak Bapak Mohammad Taufik Adraen menyampaikan saya mewakili segenap warga kelurahan Pankase Oeleta khususnya warga umat muslim yang berada di sekitar Masjid Al-Alak, mengucapkan terimakasih kepada Kodim 1604/Kupang yang telah hadir bersama kami dalam rangka melaksanakan Karya Bakti TNI di Masjid Al-Alak.

Bapak Taufik berharap semoga dengan kehadiran anggota dari Kodim 1604/Kupang dapat memberikan rasa aman, nyaman dan kedamaian bagi kami warga di kelurahan Pankase Oeleta khususnya di seputaran wilayah Masjid Al-Alak.



Kami mengucapkan terimakasih atas bantuan 50 karung semen dari kodim 1604/Kupang guna untuk membantu pembangunan Masjid Al-Alak,” ucap Bapak Taufik.

Lurah Sikumana Ibu Getruida Isabela mengatakan melalui kegiatan ini, TNI bisa menyatu dengan masyarakat Sikumana. Kami sangat menghargai atas apa yang dilakukan anggota TNI termasuk Babinsa yang ikut dalam membantu pekerjaan Gereja GMT Ora Et Labora Air Lobang.

“Kedepannya kami ingin tetap berkoordinasi dalam kegiatan positif seperti,” ujarnya.

“Kalau dulu kami sebagai masyarakat melihat TNI ketakutan, tapi sekarang dengan adanya kegiatan ini kami malah merasa senang sekaligus bangga kepada TNI yg sudah membantu bersama masyarakat,” tutur Ibu Getruida.

Sementara itu, Pendeta Paulus Nubatonis sebagai Ketua Majelis Jemaat Ora Et Labora mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasi TNI melalui Kodim 1604/Kupang dan Koramil 1604-07/Alak yang sudah terlibat membantu pekerjaan pembangunan gereja ini.

“Terima kasih kepada Komandan Kodim 1604/Kupang dan Komandan Koramil 1604-07/Alak. Kami berharap kerjasama seperti ini bisa terus berkelanjutan, terima kasih,” ungkapnya. (Pendim1604/Kupang)

Kejati NTT Sebaiknya Mengambil Langkah Bijak Menempuh Upaya Perdata Terlebih Dahulu Memastikan Status Pemilikan Tanah Pemkot Kupang



Jakarta, Wartapedia.com – Kejaksaan Tinggi NTT jangan gaspol (kecepatan tinggi) dulu, dalam mengungkap kasus dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di Kota Kupang, terkait dengan dugaan penjualan asset Pemerintah Daerah oleh Johannes Saelan, Walikota Kota Kupang kepada pihak Ketiga.

Demikian rilis yang diterima dari Petrus Selestinus Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) dan Advokat PERADI pada Minggu, (25/10/2020)

Kejaksaan Tinggi NTT perlu hati-hati, karena tindakan Pemkot Kupang adalah tindakan keperdataan karena menyangkut tindakan Pemerintah Daerah dalam jual beli tanah yang tunduk pada Hukum Perdata bahkan Hukum Adat Kupang.

Ini menyangkut pemilikan tanah oleh pihak ketiga karena jual-beli yang harus dipertimbangkan, guna menghindari Kejaksaan dari tindakan salah kaprah bahkan terjadi kriminalisasi terhadap mantan Walikota atau mantan pejabat lainnya.

Oleh karena itu, Kejaksaan Tinggi NTT sebaiknya menangguhkan seluruh proses pidana yang sedang terjadi dan seyogianya menempuh upaya perdata yaitu menggugat pihak-pihak yang diduga terlibat dalam jual beli atas tanah yang diklaim sebagai milik Pemda, untuk memastikan terlebih dahulu, sah tidaknya jual beli dan pemilikan tanahnya, melalui mekanisme gugatan perdata di Pengadilan.

TANGGUHKAN PROSES PIDANA.

Langkah Kejaksaan Tinggi NTT menetapkan dan menahan Jonas Salean (mantan Walikota) dkk. karena diduga menjual tanah Pemda kepada pihak ketiga, sebagai langkah prematur, karena itu tangguhkan seluruh proses pidana, dan tempuhlah upaya perdata, sebagai langkah akomodatif memediasi Pemkot Kupang dan pihak Ketiga yang membeli tanah dimaksud untuk mencari titik temu.

Kejaksaan Tinggi NTT dan Pemkot Kupang harus mempertimbangkan aspek tindakan keperdataan yang sudah terjadi, yaitu peralihan hak antara Pemkot dengan pihak ketiga, ada proses penerbitan Sertifikat Tanah oleh Negara sebagai bukti pengakuan oleh negara, maka seluruh proses Perdata dan Administrasi yang sudah terjadi, harus diuji terlebih dahulu secara Perdata dan Tata Usaha Negara, agar Negara tidak dinilai ingkar janji.

Kejaksaan tidak boleh terjebak dalam dugaan kriminalisasi atau politisasi kasus perdata untuk kepentingan politik Pilkada NTT Tahun 2020 atau 2024 nanti, karena hukum positif kita memberi

wewenang kepada aparat Penegak Hukum untuk menanggukhan proses pidana karena ada peristiwa perdata yang mendahuluinya dan tindakan itu tidak pernah dibatalkan secara perdata oleh para pihak yaitu Penjual dan Pembeli hingga saat ini.

ADA LANDASAN HUKUM FORMIL.

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1956 jo. No. 4 Tahun 1980, intinya mengatur soal prejudicieel Geschief, bahwa, apabila dalam pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hal adanya suatu hal perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu.

Juga ada yurisprudensi Mahkamah Agung melalui putusannya No. 628 K/Pid/1984, yang memerintahkan Pengadilan Tinggi Bandung untuk menunggu adanya putusan berkekuatan hukum tetap yang memutuskan mengenai status pemilikan tanah.

Selain itu dalam pasal 81 KUHP juga memberi wewenang kepada Hakim pidana untuk menanggukhan pemeriksaan perkara pidana menunggu pemeriksaan sengketa perdatanya.

Semangat ini yang seharusnya menjadi dasar bagi Kejaksaan NTT melihat kasus dugaan korupsi dalam penjualan tanah yang diklaim sebagai aset Pemkot Kupang, pemeriksaan perkara pidana dapat dipertanggukhan untuk menunggu suatu putusan pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu.

Oleh karena itu Kejaksaan harus mempertimbangkan semua sarana hukum yang ada, mempertimbangkan konsep dan roh Peraturan Jaksa Agung tentang Restorative Justice yang sudah menjadi pedoman bagi kejaksaan dalam menangani kasus dugaan korupsi.

Meskipun kriteria kasus ini tidak pas tetapi paling tidak semangat restorative justice dalam teori keadilan yang saat ini menjadi hukum positif melalui Peraturan Jaksa Agung, kiranya menginspirasi semua pihak terkait untuk duduk sama sama mencari solusi penyelesaiannya bukan untuk balas dendam.

Jadi Wisata Super Premium, Harus Ada Peningkatan Indeks Pelayanan Publik di Labuanbajo



Labuan Bajo, Wartapedia.com – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo melakukan Kunjungan Kerja di Labuan Bajo-Kabupaten Manggarai Barat didampingi Wakil Gubernur NTT, Josef A. Nai Soi dan Bupati Manggarai Barat, Gusti C.H. Dulah, Jumat (23/10).

Dalam Kunjungan Kerja pada hari pertama, Menteri PANRB mengunjungi Unit pelayanan publik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Polres Manggarai Barat. Menpan tekankan, ia ditugaskan Presiden Joko Widodo untuk memonitor dan membina daerah tujuan wisata.

“Labuan Bajo sudah jadi tujuan internasional maka pemda, kepolisian, dan semua pihak harus siap melayani,” ujar Menteri Tjahjo. Kamis (22/10)

Peninjauan layanan publik itu diharapkan mendorong peningkatan indeks pelayanan publik di dua unit layanan masyarakat tersebut. Pasalnya, berdasarkan evaluasi tahun 2019 yang dilakukan unit kerja Deputy bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB, DPMPTSP Kabupaten Manggarai Barat meraih kategori C- (Cukup). Unit tersebut mendapat nilai 2,48 dari skala 5.

Ada enam aspek yang dinilai, yakni inovasi, konsultasi dan pengaduan, sistem informasi pelayanan publik, sarana prasarana, profesionalisme SDM, serta kebijakan pelayanan.

“Nilai tertinggi yang dicapai DPMPTSP Kabupaten Manggarai Barat ada pada kebijakan pelayanan, yakni 2,95 dari skala 5. Sedangkan yang terendah ada pada aspek inovasi, dengan nilai 1,5.



Menteri Tjahjo juga mengapresiasi beragamnya pelayanan yang diberikan Pemkab Manggarai Barat. Namun ia menegaskan, agar penyelenggara tetap taat pada hukum dan menghindari suap atau gratifikasi.

“Di sini sudah cukup bagus pada 2019, ada 1.082 perizinan. Ini sudah merupakan daerah terbuka tapi juga harus ketat dengan aturan,” tegasnya.

Pada kesempatan yang sama, Wagub NTT, Josef Nae Soi menyampaikan apresiasi atas perhatian Pemerintah Pusat terhadap pembangunan di Flobamorata khususnya Labuan Bajo-Manggarai Barat yang telah ditetapkan sebagai salah satu

lokasi Wisata Super Premium.

“Dulu sebelum Pak Joko Widodo menjadi Presiden, daerah ini (Manggarai Barat-Labuan Bajo) kurang diminati, tapi setelah menjadi Presiden, Beliau menetapkan Labuan Bajo sebagai Destinasi Wisata Super Premium. Saya bersama Pak Gubernur turut berbangga atas kebijakan tersebut. Selamat datang Pak Menteri bersama rombongan dan selamat menikmati alam NTT,” jelas Wagub Josef.

Manggarai Barat juga menjadi salah satu Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), yang didalamnya termasuk wilayah Taman Nasional Pulau Komodo. Perkembangan KEK menjadi sebuah harapan pemulihan ekonomi nasional pasca-krisis. Pengembangan pariwisata di daerah menjadi prioritas untuk meningkatkan ekonomi daerah yang selanjutnya berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Kunjungan Kerja pada hari ke dua, Kementrian PANRB melakukan Kegiatan Raker Paguyuban Kementrian PANRB dalam rangka Akselerasi Reformasi Birokrasi. Jumat (23/10)

Pada Kegiatan tersebut, Wagub JNS dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada Menteri PANRB dalam pelaksanaan Raker tersebut di Labuanbajo.

“Atas nama Rakyat NTT, saya bersama Pak Gubernur menyampaikan apresiasi dan terimakasih kepada Pak Menteri yang telah mendukung mewujudkan daerah ini sebagai Destinasi Wisata Premium dengan menentukan Labuanbajo sebagai lokasi Raker Paguyuban Kementrian PANRB dalam rangka Akselerasi Reformasi Birokrasi di Indonesia,” Jelas Wagub Josef.

Selanjutnya Menteri PANRB dalam sambutannya tegaskan, hasil evaluasi terhadap Birokrasi, ada dua hal penting yang menjadi perhatian bersama yaitu berkaitan dengan menjaga ketahanan nasional dan Tata Kelola Pemerintahan untuk mencapai akselerasi Reformasi Birokrasi.

“ASN mesti profesional dan melaksanakan pelayanan sesuai ketentuan yang berlaku. Hasil evaluasi terhadap birokrasi, ada 2 hal yang menjadi perhatian yakni ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan untuk mewujudkan akselerasi Reformasi Birokrasi,,” tegas Menteri Tjahyo.

(Humas dan Protokol Setda Provinsi NTT)